



**ANALISIS PERLAKUAN ASET LANCAR  
TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
BERDASARKAN SAK ETAP  
(Studi Kasus di KUD Kramat Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Suci Eza Maulina**

**7101413063**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 18 Agustus 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Ade Rustiana  
NIP. 196801021992031002

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Partono", is written over the printed name of the supervisor.

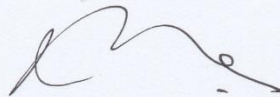
Dr. Partono Thomas, M.S.  
NIP. 195212191982031002

**PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 7 September 2017.

Penguji I



Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.  
NIP. 197212151998021001

Penguji II



Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.  
NIP. 198201302009121005

Penguji III



Dr. Partono Thomas, M.S.  
NIP. 195212191982031002

2121

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Wanyono, MM.  
NIP. 195601031983121001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Eza Maulina  
NIM : 7101413063  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 25 April 1995  
Alamat : Jl. Cucut Gang 05 No. 9 RT 04 RW 02  
Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten  
Tegal

Menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, September 2017



Suci Eza Maulina  
NIM 7101413063

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- Segala sesuatunya akan berakhir dengan baik, dan jika belum baik berarti belum berakhir. (Indah Arum Pancasari)
- Jadikan segala kondisi dalam hidupmu sebagai ibadah, senang maupun sedih itu adalah kesempatan untukmu beribadah. (Ust. Riyadh Ahmad Al Hafidz)

### Persembahan

Dengan penuh rasa syukur saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Allah SWT sebagai pemberi takdir terbaik
2. Untuk Bapak Asikin dan Ibu Sunarsih, orang tua tercinta sekaligus motivator terbaik.
3. Untuk Mas Ahmad Muzaini dan Mba Ida Nur Fatmawati, saudara tercinta
4. KUD Kramat dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal
5. Almaterku Universitas Negeri Semarang

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PRAKATA

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perlakuan Aset Lancar terhadap Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus di KUD Kramat Kabupaten Tegal)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang melalui beasiswa bidikmisi.
2. Dr. Wahyono, M.M, Dekan yang telah memberikan ijin untuk menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Ade Rustiana M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah mendukung terlaksananya Program studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Akuntansi sehingga penulis dapat belajar dan mendalami ilmu Pendidikan Akuntansi.
4. Ahmad Nurkhin, S.Pd, M.Si, Dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan dan nasehat selama perkuliahan.
5. Dr. Partono Thomas, M.S., Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi.
6. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. dan Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., Dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran agar skripsi ini lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Unnes, khususnya dosen Pendidikan Ekonomi yang selalu sabar dalam memberikan ilmu, pengetahuan, serta berbagai pengalaman kepada penulis.

8. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, Kepala KUD Kramat serta seluruh pengurus dan pengelola KUD Kramat yang telah memberikan ijin penelitian.
9. Teman-teman Pendidikan Akuntansi 2013, KSEI FE UNNES, HIMA Pendidikan Ekonomi, Majelis Annisa Unnes, Majelis Al-Batul Semarang dan Majelis Al-Madinah Gunung Pati yang telah memberikan arti kebersamaan dan kekeluargaan.
10. Keluarga besar PPL SMK Negeri 1 Batang dan KKN Kemiri Barat 2016 yang telah mengajarkan kekeluargaan.
11. Teman-teman dan sahabat yang telah kebersamai dalam perjuangan.
12. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.

Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Skripsi ini jauh dari kata sempurna dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, September 2017

Penyusun

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## SARI

**Maulina, Suci Eza.** 2017. “Analisis Perlakuan Aset Lancar terhadap Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus di KUD Kramat Kabupaten Tegal)”. Skripsi. Sarjana Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Dr. Partono Thomas MS.

**Kata Kunci : Perlakuan Aset Lancar, Penyajian Laporan Keuangan, SAK ETAP**

SAK ETAP adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas yang termasuk tanpa akuntabilitas publik adalah koperasi dan UMKM. Dari 24 KUD di Kabupaten Tegal hanya 5 KUD yang menyusun laporan keuangan dan KUD Kramat merupakan satu-satunya KUD yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal tersebut menunjukkan masih ada masalah dalam laporan keuangan koperasi di Kabupaten Tegal. *Management Letter* hasil audit laporan keuangan KUD Kramat menunjukkan perlakuan piutang tak tertagih dan penyisihan piutang tak tertagih dalam KUD Kramat masih perlu diperhatikan, sehingga aset lancar pada KUD Kramat bermasalah.

Penelitian ini dilakukan di KUD Kramat Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus laporan keuangan tahun 2014, 2015, dan 2016. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi. Uji keabsahan data adalah Triangulasi metode dan sumber. Analisis data menggunakan model pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan oleh Miles and Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian pada perlakuan aset lancar pada KUD Kramat terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Ketidaksesuaian perlakuan piutang usaha dan penurunan nilai aset menunjukkan aset lancar tidak disajikan secara wajar sehingga memengaruhi ratio likuiditas menjadi tinggi karena banyaknya aset lancar yang tidak produktif, perputaran piutang rendah karena banyaknya piutang yang tidak tertagih dan ratio solvabilitas menjadi rendah karena banyaknya modal pinjaman yang ditanamkan pada aset lancar, serta tidak sesuai perlakuan PPh Pasal 25 menunjukkan aset lancar tidak disajikan secara wajar sehingga memengaruhi ratio rentabilitas menjadi tinggi karena SHU tidak disajikan sesuai dengan nilai bersih setelah pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan KUD kurang baik. Tidak disusunnya laporan arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dan tidak disajikannya secara komparatif laporan perhitungan usaha tahun 2016 menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara konsisten, komparatif dan kelengkapan laporan keuangan sehingga memengaruhi penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. KUD Kramat seharusnya menyusun format laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dan pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan dan peningkatan kualitas laporan keuangan koperasi melalui pelatihan atau instruksi peraturan yang wajib diterapkan untuk koperasi.



## ABSTRACT

**Maulina, Suci Eza.** 2017. "Analysis of Currents Asset Treatment to the Presentation of Financial Statement based on SAK ETAP (Case Study KUD Kramat Tegal Regency)". Final Project. Education Bachelor of Accountant Economics in Accounting. Semarang State University. Advisor: Dr. Partono Thomas, MS.

**Keywords : Currents Asset Treatment, Presentation of Financial Satatements, SAK ETAP.**

SAK ETAP is a financial accounting standart which used as guidance to make the financial statements of entity non public accountability. The entity which included entity non public accountability is cooperation and Small Bussines Entity. There are 24 KUD in Tegal Regency, but there just 5 KUD that makes financial statements and only KUD Kramat that makes financial statements based on SAK ETAP. This condition show that KUD in Tegal Regency has a problem on financial statements. Management Letter of audit results financial statements's KUD Kramat show that bad debts treatment and allowance for doubfull debts treatment in financial statement of KUD Kramat should be considered, so currents aset treatment of KUD Kramat is troubled.

This study is located in KUD Kramat Kabupaten Tegal. This study use a qualitative approach to case study model on financial statement in year 2014, 2015 and 2016. Data collecting technique including documentation, interview, and observation. The ensuring of trustworthiness is triangulation methode and triangulation resources. The data anlysis technique in this study using model developed by Miles and Huberman, including : data collection, data reduction, data display, and withdrawal conclusion.

The results of this study showed that there are inappropriateness in current assets treatment to presentation of financial statement based on SAK ETAP. Inappropriateness account receivables treatment and decreasing of asset value showed that the current asset is not present properly so, that influences liquidity ratio is high because the currents assets are unproductive, turnover of account receivables is low because the bad debt is too much, solvability ratio is low because the credit investment in currents assets is too much and inappropriateness of PPh Pasal 25 influences rentability ratio is high because the profit of KUD isn't real condition, that condition makes the financial performance of KUD Kramat is not good. KUD Kramat does not make cash flows statement, capital statement, and notes of financial statement in year 2016 and the presentation of income statement in year 2016 is not compared makes financial statements of KUD Kramat are inconsistencess, incomparatif, and incompleteness. KUD Kramat should to arrange the financial statement format based on SAK ETAP the government should to improve controlling and improve financial statement of cooperative quality from training financial statement arranging and breafing about the role of cooperation that must be applied in cooperation.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA .....	vi
SARI .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
1.2. Cakupan Masalah Penelitian .....	8
1.3. Pertanyaan Penelitian .....	10
1.4. Tujuan Penelitian .....	10
1.5. Kegunaan Penelitian.....	10
1.6. Orisinalitas Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Kajian Pustaka .....	13
2.1.1. Teori Kepatuhan Kepada Penguasa ( <i>Obedience Toward Authority</i> ).....	13
2.1.2. Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan .....	16
2.1.3. Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP.....	17
2.1.4. Aset Lancar.....	22

2.1.5. Perlakuan dan Penyajian Aset Lancar berdasarkan SAK ETAP dan PSAK.....	30
2.1.6. Analisis Ratio Keuangan .....	34
2.2. Kerangka Teoritis .....	36
2.3. Kerangka Berpikir .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	42
3.2. Fokus dan Lokus Penelitian .....	43
3.3. Sumber data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.4. Teknik Keabsahan Data .....	48
3.5. Teknik Analisis Data.....	48
3.5.1. Pengumpulan Data .....	48
3.5.2. Reduksi Data .....	49
3.5.3. Penyajian Data .....	50
3.5.4. Penyimpulan dan Verifikasi.....	50
3.5.5. Kesimpulan Akhir .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1. Sejarah Singkat KUD Kramat.....	53
4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan KUD Kramat .....	54
4.1.2.1. Visi KUD Kramat .....	54
4.1.2.2. Misi KUD Kramat .....	55
4.1.2.3. Tujuan KUD Kramat .....	55
4.1.3. Kepengurusan, Badan Pengawas dan Karyawan/Pengelola.....	57
4.1.4. Jenis Usaha KUD Kramat .....	59
4.2. Hasil Penelitian .....	59
4.2.1. Gambaran Umum Penerapan SAK ETAP pada KUD Kramat.....	59
4.2.2. Perlakuan Aset Lancar pada Laporan Keuangan KUD Kramat.....	68

4.2.2.1. Perlakuan Kas .....	68
4.2.2.2. Perlakuan Bank.....	73
4.2.2.3. Perlakuan Piutang Usaha .....	75
4.2.2.4. Perlakuan Persediaan .....	83
4.2.2.5. Perlakuan Biaya Dibayar Dimuka .....	90
4.2.2.6. Perlakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	93
4.2.2.7. Perlakuan Penurunan Nilai Aset.....	94
4.2.3. Perlakuan Aset Lancar terhadap Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP.....	97
4.2.3.1. Penyajian Wajar.....	100
4.2.3.2. Kepatuhan terhadap SAK ETAP .....	102
4.2.3.3. Kelangsungan Usaha .....	103
4.2.3.4. Frekuensi Pelaporan .....	104
4.2.3.5. Penyajian yang Konsisten.....	104
4.2.3.6. Informasi Komparatif .....	105
4.2.3.7. Materialitas dan Agregasi .....	106
4.2.3.8. Laporan Keuangan Lengkap.....	106
4.2.3.9. Identifikasi Laporan Keuangan.....	107
4.3. Pembahasan.....	110
4.3.1. Gambaran Umum Penerapan SAK ETAP pada KUD Kramat.....	110
4.3.2. Analisis Kesesuaian Perlakuan Aset Lancar .....	117
4.3.2.1. Kesesuaian Perlakuan Kas .....	119
4.3.2.2. Kesesuaian Perlakuan Bank.....	123
4.3.2.3. Kesesuaian Perlakuan Piutang Usaha.....	125
4.3.2.4. Kesesuaian Perlakuan Persediaan .....	132
4.3.2.5. Kesesuaian Perlakuan Biaya Dibayar Dimuka.....	135
4.3.2.6. Kesesuaian Perlakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	139



4.3.2.7. Kesesuaian Perlakuan Penurunan Aset.....	140
4.3.3. Analisis Perlakuan Aset Lancar terhadap Penyajian	
Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP.....	144
4.3.3.1. Kesesuaian Penyajian Wajar.....	147
4.3.3.2. Kesesuaian Kepatuhan terhadap SAK ETAP ..	150
4.3.3.3. Kesesuaian Kelangsungan Usaha .....	150
4.3.3.4. Kesesuaian Frekuensi Laporan Keuangan.....	152
4.3.3.5. Kesesuaian Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan .....	152
4.3.3.6. Kesesuaian Penyajian Komparatif.....	155
4.3.3.7. Kesesuaian Materialitas dan Agregasi.....	156
4.3.3.8. Kesesuaian Kelengkapan Laporan Keuangan .	157
4.3.3.9. Kesesuaian Identifikasi laporan Keuangan .....	160
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>162</b>
5.1. Simpulan .....	162
5.2. Saran .....	163
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>165</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>168</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Perlakuan Aset Lancar berdasarkan SAK ETAP dan PSAK .....	30
Tabel 2.2. Penyajian Aset Lancar dalam Neraca .....	32
Tabel 2.3. Jumlah Nominal Pos dalam Aset Lancar yang Disajikan .....	33
Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu .....	38
Tabel 3.1. Data yang Diperlukan dalam Fokus Penelitian Aset Lancar .....	44
Tabel 3.2. Data yang Diperlukan dalam Fokus Penelitian Penyajian Laporan Keuangan.....	46
Tabel 4.1. Daftar Nama karyawan/Pengelola KUD Kramat.....	58
Tabel 4.2. Daftar Nama Karyawan/Pengelola KSP KUD Kramat.....	58
Tabel 4.3. Daftar KUD yang Mengadakan RAT tahun Buku 2015.....	59
Tabel 4.4. Daftar Kewajiban dan Modal serta Sumbernya KUD 2015 .....	62
Tabel 4.5. Jenis Laporan Keuangan yang Disusun KUD .....	64
Tabel 4.6. Jumlah Piutang yang Disajikan.....	77
Tabel 4.7. Perlakuan Piutang Bunga pada Investasi KSP.....	79
Tabel 4.8. Perlakuan Piutang Macet/Program.....	81
Tabel 4.9. Perlakuan Penyisihan Piutang Tak Tertagih .....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian .....	39
Gambar 3.1. Komponen Analisis Data ( <i>Interactive Analysis Models</i> Miles (1994) dan Faisal (2003)) .....	51
Gambar 4.1. Sistem Pelaporan Kas dalam KUD Kramat .....	69
Gambar 4.2. Sistem Pelaporan Persediaan dalam KUD Kramat .....	84
Gambar 4.3. Faktur Pembelian Persediaan KUD Kramat.....	87
Gambar 4.4. Kartu Persediaan KUD Kramat.....	88
Gambar 4.5. Sistem Pelaporan Keuangan KUD Kramat.....	97



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Instrumen Penelitian.....	168
Lampiran 2	Pedoman Observasi.....	172
Lampiran 3	Hasil Observasi.....	176
Lampiran 4	Pedoman Wawancara.....	180
Lampiran 5	Transkrip Hasil Wawancara.....	194
Lampiran 6	Reduksi Hasil Wawancara dan Dokumentasi.....	230
Lampiran 7	Hasil Observasi Awal.....	236
Lampiran 8	Surat Ijin Penelitian.....	238
Lampiran 9	Surat Ijin Observasi.....	241
Lampiran 10	Dokumentasi Penelitian.....	245
Lampiran 11	Manajemen Letter KUD Kramat.....	249
Lampiran 12	Laporan keuangan KUD Kramat 2016.....	25



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas yang termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. SAK ETAP disusun untuk meningkatkan aspek keuangan, melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) penggunaan PSAK 27 tentang Akuntansi Koperasi diganti dengan SAK ETAP yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. Sebagai organisasi yang memiliki karakteristik tersendiri maka perlu sebuah standar akuntansi khusus untuk koperasi (Khafid dkk 2010). Standar akuntansi tersebut dibuat sebagai bagian dari peningkatan kualitas laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 37 ayat 2 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap entitas tanpa akuntabilitas publik wajib menggunakan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan.

Keberadaan usaha mikro sangat penting peranannya dalam perubahan peraturan ekonomi di Indonesia, tetapi sampai sekarang banyak permasalahan yang menghalangi perkembangan usaha mikro (Haryani 2012). Permasalahan dalam hal laporan keuangan koperasi masih sering menjadi penyebab menurunnya kualitas koperasi. Kepala Bagian Koperasi di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Kabupaten Tegal Bapak Suroso menyatakan bahwa beberapa faktor yang membuat KUD tidak aktif yaitu faktor keuangan dan sumberdaya manusia yang rendah karena minat masyarakat untuk berpartisipasi di KUD semakin sedikit, padahal sebagai salah satu sumberdaya strategis untuk menjalankan usaha, masalah pengelolaan keuangan ini sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup koperasi (Sumarsono 2003:93).

Data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal tahun 2015, jumlah KUD yang masih aktif menjalankan usahanya sebanyak 20 unit dari 24 unit KUD di Kabupaten Tegal. Keberadaan beberapa KUD yang terdaftar aktif hanya berbentuk bangunan tanpa beroperasi, namun KUD tersebut masih terdaftar aktif dalam dinas, contohnya yaitu KUD Dukuhwaru dan KUD Pangkah. Hasil pendataan dari 20 KUD yang terdaftar aktif di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal hanya lima KUD yang menyusun laporan keuangan dan KUD Kramat merupakan satu-satunya yang menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangannya, padahal laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban yang wajib disusun oleh setiap jenis entitas sesuai dengan Undang-Undang Dagang Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi setiap orang menyelenggarakan suatu perusahaan wajib membuat catatan dengan cara demikian sehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

Pemerintah Indonesia belum siap untuk mengkhususkan kewajiban usaha mikro kecil dan menengah untuk membuat laporan keuangan (Wulanditya dkk 2012). Sesuai aturan yang berlaku, KUD merupakan bagian dari jenis koperasi yang

wajib menerapkan SAK ETAP. Dari lima KUD yang menyusun laporan keuangan di Kabupaten Tegal hanya KUD Kramat yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Dalam akuntansi keuangan, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pembukuan (Yuliana 2012). SAK ETAP (2016:3) menjelaskan bahwa laporan keuangan menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi penggunanya. Sehingga melalui laporan keuangan posisi keuangan dan kinerja keuangan dapat dinilai dalam setiap komponennya. Salah satunya yaitu melalui pos aset lancar, aset lancar menjadi bagian yang sangat penting dalam laporan keuangan. Aset adalah harta kekayaan yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam rangka mencapai tujuan umum perusahaan (Rudianto 2012:46). Aset lancar adalah jenis aset yang mempunyai manfaat kurang dari satu periode akuntansi. Tanpa aset perusahaan tidak akan mampu beroperasi sehingga aset diperlukan untuk kegiatan operasi perusahaan (Rudianto 2012:46). Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah kebijakan yang harus diterapkan dalam perlakuan aset lancar agar penyajian aset lancar dapat disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.

Perlakuan dan penyajian aset lancar tidak dijelaskan secara khusus disuatu bab pembahasan dalam SAK ETAP, karena pada perlakuannya akuntansi aset lancar pada SAK ETAP masih sama dengan PSAK tentang aset lancar, kecuali pada laporan arus kas, persediaan, dan dijelaskan kembali di SAK ETAP bab 22 tentang penurunan nilai aset. SAK ETAP (2016:29) menjelaskan jika SAK ETAP tidak mengatur secara khusus suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya maka manajemen harus mempertimbangkan untuk mengembangkan dan menerapkan

suatu kebijakan akuntansi. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, manajemen juga harus mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam PSAK non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait. Maka dari itu, dalam perlakuan dan penyajian aset lancar tidak hanya mengacu pada SAK ETAP tetapi mengacu pula pada SAK non- ETAP.

Penyajian adalah proses penempatan pos/akun dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar. SAK ETAP (2016:3) menjelaskan bahwa penyajian mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang sesuai dengan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam bab 2 konsep dan prinsip pervasif. Ini berarti suatu penyajian aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan tergantung pada konsep pengakuan dan pengukuran (perlakuan) suatu aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang sudah diatur. Perlakuan terdiri dari pengakuan dan pengukuran. Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan keuangan (SAK ETAP 2014:8). Hal ini berarti pengakuan dan pengukuran (perlakuan) terhadap aset, kewajiban, penghasilan dan beban akan berpengaruh terhadap penyajian yang sesuai.

Aset lancar merupakan bagian dari aset. Sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK no 09, aset lancar disajikan dalam laporan keuangan neraca yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha maupun piutang lainnya, persediaan, dan aset lancar lainnya yang masing-masing akun tersebut telah diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berkaitan. SAK ETAP (2016:8) menjelaskan bahwa aset



diakui dalam neraca apabila manfaat ekonominya dimasa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai dan biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan dipandang manfaat ekonominya tidak mengalir lagi selama periode berjalan dan menimbulkan pengakuan beban (SAK ETAP 2014:8). Suatu aset diakui dalam aset lancar atau tidak lancar tergantung manfaat ekonomi suatu aset tersebut.

Kesempurnaan atas penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di KUD Kramat belum sepenuhnya baik, meskipun KUD Kramat sudah diaudit langsung oleh auditor eksternal dari Semarang tetapi kekurangan dalam hal kecil masih terjadi di beberapa pos laporan keuangan. Sesuai dengan hasil analisis auditor eksternal KUD Kramat tertanggal 13 November 2015 dalam *Management Letter* atas audit laporan keuangan KUD Kramat tahun berakhir Desember 2014 terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam laporan keuangan KUD Kramat diantaranya yaitu tentang piutang macet dan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang macet dan penyisihan piutang tak tertagih termasuk kedalam pos aset lancar dalam neraca sesuai dengan penyajian laporan keuangan neraca dalam SAK ETAP.

Hasil dokumentasi laporan keuangan KUD Kramat 2015 menunjukkan, KUD Kramat menyajikan piutang pada laporan keuangan neraca. Akun piutang anggota disajikan dipos aset lancar dan piutang macet disajikan di aset tidak lancar. Piutang anggota merupakan piutang yang berasal dari kegiatan utama penjualan pupuk dan beras KUD Kramat yang disajikan sebesar nilai kotor piutang tanpa menampilkan jumlah penyisihan piutang tak tertagih. Menurut Ketua KUD Kramat, piutang macet yang ada dalam KUD Kramat merupakan piutang yang berasal dari program

zaman orde baru yang sudah tidak mungkin untuk ditagihkan tetapi masih disajikan dalam aset tidak lancar KUD Kramat, padahal piutang macet manfaat ekonominya sudah tidak mengalir pada periode tersebut.

Pengukuran piutang macet yang disajikan di neraca 2015 sebesar Rp. 1.012.761.487,54 diakui sebagai aset tidak lancar. Sebagai bagian dari perlakuan piutang terdapat pula akun penyisihan piutang yang merupakan akun pengurang dari piutang macet sebesar Rp. 62.615.654,63 dan besaran itu sama setiap tahunnya tanpa ada perubahan saldo serta tidak diungkapkan dasar pengukurannya dalam catatan atas laporan keuangan. Ditemukan pula beban penyisihan piutang pada laporan perhitungan hasil usaha yang masih bersaldo nol, ini berarti tidak ada pembebanan penyisihan piutang tak tertagih selama periode laporan keuangan. Hal ini masih menimbulkan banyak pertanyaan berkaitan dengan perlakuan akuntansi piutang pada KUD Kramat serta dasar penyisihan piutang tak tertagih KUD Kramat.

Adanya kesalahan perlakuan dalam akuntansi piutang KUD Kramat ini menunjukkan adanya kesalahan perlakuan pada aset lancar pula dan akan membuat penyajian laporan keuangan KUD Kramat menjadi tidak sesuai dengan SAK ETAP. Piutang yang sudah tidak lagi mengalir masa manfaatnya masih diakui sebagai aset tidak lancar dalam neraca KUD Kramat. Seharusnya ini diakui sebagai pengurang atas piutang KUD Kramat dan ketidakjelasan pengukuran dan pengungkapan atas piutang macet dan penyisihan piutang tak tertagih pun masih belum diungkapkan. Saran yang diberikan dalam *Manajemen Letter* KUD Kramat tahun 2015 yang diterbitkan oleh auditor eksternal KUD Kramat, pencatatan atas penyisihan

penghapusan piutang tak tertagih seharusnya sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam perhitungan penyisihan penghapusan aset produktif seharusnya 0,5 % dari piutang atau pembiayaan lancar, 10 % dari piutang atau pembiayaan kurang lancar, 50 % dari piutang atau pembiayaan diragukan dan 100 % dari piutang atau pembiayaan macet. Serta dasar perhitungan atas penyisihan piutang tak tertagih harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa aset lancar pada KUD Kramat belum sesuai dengan SAK ETAP sehingga akan memengaruhi penyajian aset lancar pada laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAK ETAP. Maka dapat dinilai bahwa ada masalah dalam perlakuan dan penyajian aset lancar berdasarkan SAK ETAP pada laporan keuangan KUD Kramat Kabupaten Tegal, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana perlakuan aset lancar terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada KUD Kramat Kabupaten Tegal.

Penerapan standar akuntansi keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh entitas untuk mengetahui bagaimana kepatuhan suatu entitas terhadap standar keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlakuan aset lancar dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada KUD Kramat. Peneliti memilih objek penelitian KUD Kramat karena KUD Kramat merupakan salah satu KUD yang cukup maju dan satu-satunya KUD yang sudah menyatakan penerapan SAK ETAP secara eksplisit didalam catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi KUD Kramat dalam hal penerapan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dan menjadi perbaikan terhadap hasil penilaian auditor.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan SAK ETAP pada koperasi, masih banyak beberapa koperasi yang masih belum menerapkan SAK ETAP sepenuhnya karena perlakuan aset lancar yang belum sesuai. Sartika (2014) dalam penelitiannya tentang Analisis piutang usaha berdasarkan SAK ETAP pada CV Perintis Grafika Jaya Teluk Kuantan membuktikan bahwa masih terdapat kesalahan dalam perlakuan piutang, perusahaan menggunakan metode penghapusan piutang tak tertagih secara langsung dan tidak membuat taksiran penyisihan piutang tak tertagih terlebih dahulu, sehingga membuat kerugian akibat piutang tak tertagih besar. Dapat disimpulkan akibat dari hal tersebut CV Perintis Grafika belum menerapkan SAK ETAP yang sesuai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengambil obyek penelitian di KUD Kramat Kabupaten Tegal yang belum pernah diteliti penerapan SAK ETAP sebelumnya oleh peneliti yang lain. Harapan kedepannya KUD Kramat dapat menjadi acuan bagi KUD yang lainnya di Kabupaten Tegal dalam menerapkan akuntansi perkoperasian.

## **1.2. Cakupan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti memberi cakupan masalah atas penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Koperasi wajib menggunakan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan koperasi sebagai pengganti PSAK 27.
- 2) Jumlah KUD aktif di Kabupaten Tegal sebanyak 20 dari 24 koperasi yang terdaftar, tetapi pada kenyataannya KUD yang terdaftar aktif masih ada beberapa KUD yang sudah tidak beroperasi.



- 3) Penyebab pasifnya KUD di Kabupaten Tegal yaitu pengelolaan keuangan yang kurang baik dan kepercayaan masyarakat yang menurun. Dibuktikan dengan jumlah KUD yang menyusun laporan keuangan hanya 5 KUD dari 20 KUD aktif.
- 4) Penyusunan laporan keuangan KUD di Kabupaten Tegal belum sesuai standar akuntansi yang berlaku dan KUD yang menggunakan SAK ETAP hanya KUD Kramat.
- 5) *Manajemen Letter* KUD Kramat yang berasal dari auditor eksternal KUD Kramat yang menyatakan bahwa perlu perhatian dalam piutang macet dan penyisihan piutang tak tertagih secara umum pembebanan atas beban penyisihan piutang tak tertagih belum sesuai dengan kebijakan akuntansi sehingga menyebabkan ketidaksesuaian perlakuan dan penyajian aset lancar.
- 6) Penyajian piutang KUD Kramat yang menyajikan sebesar nilai kotor dari piutang dan tidak menampilkan penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang anggota.
- 7) Penyajian piutang macet yang masih termasuk dalam aset tidak lancar.
- 8) Pembebanan atas beban penyisihan piutang tak tertagih sebagai pengurang dari piutang macet yang tidak dijelaskan dasar pengukurannya.
- 9) Penelitian ini dilaksanakan di KUD Kramat Kabupaten Tegal.
- 10) Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017
- 11) Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi laporan keuangan tahun 2014, 2015 dan 2016 dan didukung oleh hasil observasi dan wawancara langsung.

12) Peneliti hanya meneliti perlakuan aset lancar saja yang ada di KUD Kramat terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan cakupan masalah penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Bagaimana kesesuaian perlakuan aset lancar pada laporan keuangan KUD Kramat berdasarkan SAK ETAP?
- 2) Bagaimana kesesuaian perlakuan aset lancar terhadap penyajian laporan keuangan KUD Kramat berdasarkan SAK ETAP?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan aset lancar dalam laporan keuangan KUD Kramat berdasarkan SAK ETAP.
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan aset lancar terhadap penyajian laporan keuangan KUD Kramat berdasarkan SAK ETAP.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi dan mengembangkan teori Kepatuhan oleh Stanley Milgram (Atkinson dkk 2010). Atkinson dkk (2010:630) menjelaskan bahwa dalam penelitian Milgram (1974) norma sosial atau aturan yang

berlaku, pengawas dan kebenaran ideologis berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang terhadap penguasa. Sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana KUD Kramat menerapkan SAK ETAP sesuai aturan pemerintah yang berlaku, kepatuhan terhadap dewan pengawas dan pembenaran ideologis dari auditor eksternal sebagai bukti kepatuhannya. Penelitian ini juga dapat mengembangkan peraturan yang ada dalam pengimplementasiannya.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi pengurus koperasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam praktek akuntansi aset lancar sesuai SAK ETAP sehingga akan bertambah ilmu pengetahuan pengurus tentang perlakuan aset lancar berdasarkan SAK ETAP baik teori maupun prakteknya.
- b. Bagi KUD Kramat dan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KUD Kramat dalam penerapan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan koperasi serta peningkatan sosialisasi pemerintah kepada koperasi mengenai SAK ETAP.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai kondisi koperasi Indonesia sekarang dan bagaimana penerapan SAK-ETAP, khususnya di KUD Kramat Kabupaten Tegal.

### 1.6. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kepatuhan KUD Kramat dalam perlakuan aset lancar terhadap laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Koperasi berdasarkan SAK ETAP serta peraturan lain yang mengatur mengenai aset lancar dalam Standar Akuntansi Keuangan. Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, belum ada penelitian tentang perlakuan aset lancar terhadap laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di KUD Kramat.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Kajian Pustaka**

#### **2.1.1. Teori Kepatuhan Kepada Penguasa (*Obedience Toward Authority*)**

Teori Kepatuhan Kepada Penguasa dikembangkan yaitu Stanley Milgram (1963, 1974) di Yale University. Biasanya orang-orang cenderung mengikuti permintaan atau perintah orang lain yang dianggap memiliki kekuatan (*power*). Perilaku-perilaku ini dalam psikologi sosial disebut sebagai *obedience* atau kepatuhan dalam psikologi sosial (Sarlito dkk 2009:116). Menurut Baron dkk (2008) dalam Sarlito dkk (2009:116) *Obedience* merupakan salah satu jenis pengaruh sosial, dimana seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur *power*.

Menurut Milgram (1963) dalam Atkinson dkk (2010:630) menyatakan bahwa potensi untuk timbulnya kepatuhan pada penguasa merupakan semacam persyaratan penting bagi kehidupan bermasyarakat yang mungkin telah terbentuk pada spesies kita melalui evolusi. Pembagian kerja dalam masyarakat mengharuskan orang-orang untuk menanggung dan menyelaraskan tindakan mereka demi kepentingan tujuan dan harapan organisasi sosial yang lebih besar. Orang tua, sistem sekolah dan bisnis semuanya memelihara kepatuhan ini lebih jauh dengan mengajarkan individu tentang pentingnya petunjuk orang lain yang “mengatahui gambaran lebih besar”.

Teori Kepatuhan Milgram (1963) dalam Atkinson dkk (2010:631) menjelaskan bahwa untuk memahami kepatuhan dalam sistem tertentu kita perlu



memahami faktor-faktor yang memengaruhi orang untuk melepaskan otonominya dan secara sukarela menjadi bagian dari sistem, faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Norma Sosial (*Social Norms*)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima atau aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Sarlito dkk (2009:52) menjelaskan norma sosial sebagai aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana sebaiknya bertingkah laku. Norma sosial biasanya dapat berupa *Injunctive Norms* yang biasanya dinyatakan secara eksplisit sedangkan *descriptive norms* yang biasanya berifat implisit, tidak dinyatakan secara tegas dan tertulis.

Dalam penelitian Milgram, norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang terhadap penguasa. Eksperimen Milgram memperkuat norma sosial dengan membuatnya sulit untuk dihentikan dalam suatu eksperimen, prosedur dilakukan secara bertahap sehingga subjek terus menerus melakukan perintah sesuai yang sudah dilakukan sebelumnya (Atkinson dkk 2010:631).

2) Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berarti penilikan dan penjagaan. Dalam eksperimen Milgram, salah satu faktor yang jelas dalam kaitannya dengan kepatuhan adalah keberadaan pengawas sangat berpengaruh terhadap kepatuhan objek penelitian. Milgram membuktikan jika peneliti meninggalkan

ruangan tersebut instruksinya melalui telepon, kepatuhan turun dari 65 persen menjadi 21 persen (Atkinson 2010:632).

### 3) Buffer

Menurut KBBI, buffer berarti penyangga atau penahan. Yaitu dengan mengirimkan orang lain sebagai buffer untuk meningkatkan kepatuhan dalam penelitian.

### 4) Pembenaran Ideologis

Penerimaan seseorang terhadap suatu ideologi yang mengabsahkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan instruksi. Menurut eksperimen Milgram, faktor keempat yang paling penting yang menghasilkan kepatuhan sukarela adalah penerimaan individual terhadap suatu ideologi berupa sekumpulan keyakinan dan sikap yang mengabsahkan kepentingan yang berkuasa dan memberikan perintah mereka (Atkinson 2010:634).

Kaitanya teori Kepatuhan Kepada Penguasa (*Obedience Toward Authority*) dengan penelitian ini yaitu kepatuhan KUD Kramat dalam menerapkan SAK ETAP pada perlakuan aset lancar dan penyajian laporan keuangannya. Sesuai dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui bagaimana kesesuaian perlakuan aset lancar KUD Kramat terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Menurut sumber data awal bahwa KUD Kramat menggunakan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangannya merupakan salah satu bukti kepatuhan KUD Kramat terhadap peraturan pemerintah (norma sosial) dan atas dasar anjuran auditor eksternal sebagai pembenaran ideologis atas adanya peraturan tersebut.

### **2.1.2. Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan.**

Dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, pengertian masing-masing menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (2015:14) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 3) Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/ akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut akan mengalir dari atau kedalam entitas koperasi;
- 4) Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan;
- 5) Penyajian merupakan proses penempatan pos/ akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar.
- 6) Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/ akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Tujuan dari pernyataan tersebut adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh entitas koperasi sektor riil secara terukur, tepat, wajar dan konsisten

sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **2.1.3. Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP**

Penyajian wajar dalam laporan keuangan dijelaskan dalam SAK ETAP bab 3, dimana dalam bab tersebut menjelaskan penyajian wajar laporan keuangan yang mematuhi persyaratan SAK ETAP dan pengertian laporan keuangan yang lengkap, berikut ini merupakan indikator penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP Bab 3, antara lain :

#### 1) Penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 konsep dan prinsip pervasif (SAK ETAP 2016:11). Penerapan SAK ETAP dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

#### 2) Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak

boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP (SAK ETAP 2016:11)

### 3) Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha entitas tersebut dan menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan signifikan terhadap entitas untuk melakukan kelangsungan usaha. Maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan tersebut berdasarkan asumsi kelangsungan usaha maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha (SAK ETAP 2016:11).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (2015:12) menjelaskan bahwa laporan keuangan harus disusun atas dasar kelangsungan usaha dan asumsi menurut pembaca laporan keuangan, bahwa koperasi sektor riil akan meneruskan operasionalnya dimasa depan kecuali apabila laporan keuangan disusun atas dasar tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut dijelaskan seperti rencana pembubaran, penggabungan, peleburan, dan pemisahan, maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.



#### 4) Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali (SAK ETAP 2015:11). Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan : 1) fakta tersebut; 2) alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan 3) fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan (SAK ETAP 2015:12).

#### 5) Penyajian yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus berubah kecuali : 1) terjadi perubahan signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan untuk menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam bab 9 kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan, atau ; 2) SAK ETAP mensyaratkan perubahan penyajian (SAK ETAP 2016:12).

Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka entitas harus mengklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis, entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif diklasifikasikan : 1) sifat reklasifikasi; 2) jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi dan 3) alasan reklasifikasi. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan : 1) alasan

reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan dan 2) sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasikan.

#### 6) Informasi Komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan (SAK ETAP 2016:12).

#### 7) Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat dan fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama dapat memengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu (SAK ETAP 2016:12).

#### 8) Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan entitas meliputi: 1) neraca; 2) laporan laba rugi; 3) laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.; 4) laporan arus kas dan; 5) catatan atas informasi laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya (SAK ETAP 2016:12).

Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi. Pembayaran deviden, kesalahan koreksi pada periode lalu dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Suatu laporan keuangan lengkap harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Dalam laporan keuangan lengkap suatu entitas menyajikan setiap laporan keuangan dengan keunggulan yang sama (SAK ETAP 2016:13).

#### 9) Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan (SAK ETAP 2016:13). Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Disamping itu, informasi berikut disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan : 1) nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir; 2) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangannya ; 3) mata uang pelaporan, d) pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan: 1) domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar; 2) penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya.

#### 2.1.4. Aset Lancar

Rudianto (2012:68) menjelaskan bahwa aset adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam rangka tujuan umum perusahaan. Aset lancar adalah harta kekayaan perusahaan yang diperkirakan akan berubah menjadi uang dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak disusunnya laporan keuangan perusahaan tersebut (Rudianto 2012:79). Menurut Juan dan Wahyuni (2014:128) untuk entitas yang menyajikan aset lancar dan tidak lancar secara terpisah dalam laporan keuangan, PSAK 1 memberikan panduan tentang klasifikasi yang tepat. Secara khusus paragraf 63 PSAK 1 mengatur bahwa suatu aset harus diklasifikasikan sebagai aset lancar bila aset itu :

- (a) Diperkirakan akan direalisasi, atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.
- (b) Dimiliki untuk diperdagangkan
- (c) Diperkirakan akan direalisasikan dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan atau;
- (d) Merupakan aset kas atau setara kas, yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak masuk kategori tersebut masuk kedalam kategori aset tidak lancar. Dengan demikian, pos-pos aset biasanya dimasukkan kedalam aset lancar karena pos-pos itu diperkirakan akan direalisasi dalam jangka waktu satu tahun atau siklus normal entitas mana saja yang lebih lama. Dapat dilihat pula bahwa persediaan dagang dan piutang dagang diklasifikasikan sebagai aset lancar, meskipun keduanya dapat direalisasi setelah periode 12 bulan, karena sesuai definisi, keduanya diperkirakan akan direalisasi dalam satu siklus akuntansi.

PSAK 09 mengungkapkan cakupan aset lancar yang terdiri dari kas dan bank, surat berharga yang mudah dijual, deposito jangka pendek, wesel tagih yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahu, piutang, persediaan, pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar, pembayaran pajak dimuka, dan biaya dibayar dimuka. Dalam SAK ETAP yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Koperasi berdasarkan SAK ETAP, beberapa akun yang disajikan dalam aset lancar antara lain Kas, Bank, Surat Berharga, Piutang Usaha, Penyisihan Piutang tak tertagih, persediaan perlengkapan kantor, persediaan barang dagangan, biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima dan aset lancar lainnya. Berikut ini penjelasan masing-masing :

1) Kas dan Bank

Menurut Permen KUKM Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (2015:20) menjelaskan bahwa kas adalah nilai mata uang kertas dan logam, baik dalam rupiah maupun mata uang asing sebagai alat pembayaran dan siap serta bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Transaksi kas diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan dalam pos aset lancar. Kas dalam bentuk mata uang asing harus disajikan dengan mengonversi kedalam mata uang rupiah. Hal yang harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan seperti rincian jumlah uang kas dan penjelasan kurs rupiah pertanggal laporan, hal tersebut dijelaskan secara rinci dalam Permen KUKM Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (2015:21).



PSAK 09 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Pos-pos yang tidak diakui dalam kas/bank antara lain persediaan perangko, cek mundur, cek kosong dari pihak ketiga dan rekening giro pada bank diluar negeri yang tidak dapat segera dipakai.

Martani dkk (2016:181) menjelaskan bahwa setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, agar dapat diklasifikasikan dalam setara kas harus memenuhi karakteristik dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah tertentu tanpa resiko perubahan nilai dan jatuh temponya sangat dekat. Untuk menunjukkan jumlah kas dalam perusahaan dan transaksi yang berkaitan dengan kas dibuatlah pelaporan kas melalui laporan arus kas yang terdiri dari 3 aktivitas operasi antara lain :

- a) Rudianto (2012:195) menjelaskan aktivitas operasi yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua upaya yang terkait dengan menjual produk tersebut. Tercakup aktivitas antara lain penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari luar sumber usaha utama, pembelian bahan baku/barang dagangan, pembayaran beban tenaga kerja, pembayaran beban overhead, pembayaran beban pemasaran, pembayaran beban administrasi dan umum
- b) Rudianto (2012:196) menjelaskan aktivitas investasi yaitu berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi/saham perusahaan lain dan sebagainya.

- c) Rudianto (2012:196) menjelaskan aktivitas keuangan yaitu semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Aktivitas keuangan secara umum dibagi dua yaitu : perolehan modal dari pemilik dan kompensasinya berupa pengembalian atas dan dari investasi mereka dan pinjaman uang dari kreditor dan pembayaran kembali utang yang dipinjam.

Metode penyusunan laporan arus kas terdiri dari dua format yaitu :

- a) Metode langsung

Rudianto (2012:198) menjelaskan metode langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas dimana dirinci aliran masukkas dari aktivitas-aktivitas operasi dan aliran kas keluar terdiri dari aktivitas-aktivitas operasi.

- b) Metode tidak langsung

Rudianto (2012:198) menjelaskan metode tidak langsung adalah metode penyusunan arus kas dimana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan aliran kas. Metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih dan mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi.

- 2) Piutang

Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Politik penjualan kredit ini merupakan politik yang biasa dilakukan dalam dunia bisnis untuk merangsang minat para pelanggan (Thomas 2011:37). Istilah piutang (*receivables*) mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi

lain, piutang-piutang ini merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar (Reeve 2012:437).

Reeve (2012:438) menjelaskan bahwa piutang digolongkan menjadi beberapa jenis piutang, antara lain :

a) Piutang usaha

Transaksi paling umum yang menghasilkan piutang adalah penjualan barang atau jasa secara kredit (Reeve dkk 2012:437) . Piutang dicatat sebagai debit piutang usaha (*account receivable*). Piutang semacam ini biasanya diharapkan dapat ditagih dalam waktu dekat, misalnya 30 atau 60 hari. Piutang ini digolongkan sebagai aset lancar dineraca.

b) Piutang wesel

Wesel tagih (*notes receivables*) adalah pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal (Reeve dkk 2012:438). Selama diharapkan dapat ditagih dalam waktu setahun, wesel tagih biasanya digolongkan sebagai aset lancar di neraca. Wesel tagih seringkali digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Wesel tagih dapat digunakan untuk melunasi piutang pelanggan. Wesel tagih dan piutang yang dihasilkan dari transaksi penjualan kadang disebut dengan piutang dagang (*trade receivables*).

c) Piutang lainnya

Piutang lainnya biasaya dikelompok secara terpisah dineraca. Jika piutang tersebut diharapkan akan ditagih dalam waktu satu tahun, maka digolongkan sebagai aset lancar. Jika diperkirakan tertagih lebih dari satu tahun, maka digolongkan sebagai aset tidak lancar dan dilaporkan dibawah pos investasi piutang

lainnya mencakup piutang bunga, piutang pajak dan piutang karyawan (Reeve dkk 2012:438).

### 3) Piutang Tak Tertagih

Politik penjualan kredit diharapkan perusahaan dapat memenangkan persaingan, memperbesar hasil penjualan dan selanjutnya meningkatkan laba bersih perusahaan (Thomas 2011:37). Penjualan kredit akan menimbulkan resiko kredit pula yang berupa piutang tak tertagih. Tanpa melihat bagaimana kebijakan yang dipakai dalam memberikan kredit dan prosedur penagihan yang digunakan sebagian dari penjualan kredit tidak akan bisa ditagih. Beban operasi yang dicatat dari piutang tak tertagih disebut beban piutang tak tertagih (*bad debt expense*) (Reeve dkk 2012:438).

Dalam perlakuan piutang tak tertagih ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengakui dan mengukur piutang tak tertagih agar disajikan secara tepat dineraca, yaitu :

#### a) Metode Penghapusan Langsung Piutang Tak Tertagih

Pada metode penghapusan langsung piutang tertagih, beban penghapusan piutang tidak akan dicatat sampai dengan pelanggan benar-benar tidak bisa membayar. Pada saat itu piutang pelanggan akan segera dihapus. Beban piutang tak tertagih akan langsung mengurangi piutang pelanggan yang berkaitan (Reeve dkk 2012:439).

Prinsip akuntansi berterima umum mengharuskan entitas dengan jumlah piutang besar untuk menggunakan metode penyisihan (Reeve dkk 2012:440). Metode ini mencatat estimasi jumlah piutang yang tidak dapat tertagih dan mencatat

estimasi beban piutang tak tertagih berdasarkan estimasinya setiap akhir periode akuntansi (Reeve dkk 2012:441). Berdasarkan estimasi tersebut, beban piutang tak tertagih dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian. Nilai estimasi tersebut tidak mengurangi akun piutang suatu pelanggan tertentu apabila entitas tidak mengetahui pelanggan mana yang diperkirakan tidak dapat membayarnya. Sebagainya dibuatlah akun kontra bernama penyisihan piutang tak tertagih (*Allawance for doubtfull account*).

Jurnal tersebut akan memengaruhi penyajian dineraca dan beban di laporan laba rugi. Hal ini akan berkaitan dengan neraca, dimana akan mengurangi pendapatan yang ditandingkan di neraca dengan laporan laba rugi. Dan akan menghasilkan nilai realisasi kas bersih dari neraca yang akan disajikan di neraca.

#### 4) Persediaan

Permen KUKM Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (2015:22) menjelaskan bahwa SAK ETAP menjelaskan persediaan sebagai nilai kekayaan koperasi yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan barang dagangan, bahan baku langsung, barang dalam proses, barang jadi dengan kriteria : 1) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 2) masih dalam proses produksi untuk diselesaikan kemudian dijual, dan; 3) akan dipergunakan untuk produksi barang-barang jadi yang akan dijual. Transaksi diakui segai aset dan dicatat sebesar nilai perolehan persediaan. Disajikan dalam pos aset lancar dan rincian persediaan berdasarkan jenis dan kelompok persediaan dan jumlah persediaan dijaminan.

Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan



lokasi sekarang (SAK ETAP 2016:39). SAK ETAP (2016:41) menjelaskan bahwa entitas harus menentukan biaya persediaan dengan menggunakan rumus biaya Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang.

5) Biaya dibayar dimuka

Permen KUKM nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (2015:22) menjelaskan bahwa biaya dibayar dimuka adalah sejumlah dana yang telah dibayarkan kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat barang/jasa. Contoh sewa gedung yang dibayar dimuka untuk jangka waktu tertentu lebih dari satu periode akuntansi. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai perolehannya. Disajikan dipos aset lancar dan hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Biasanya biaya dibayar dimuka bisa meliputi uang muka dan PPh dibayar dimuka. SAK ETAP (2016:99) menjelaskan bahwa entitas mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar.

6) Pendapatan yang akan diterima

Permen KUKM nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (2015:22) menjelaskan bahwa pendapatan yang akan diterima adalah berbagai jenis pendapatan koperasi yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan tetapi tetapi belum dapat diterima pembayaran secara tunai. Diakui sebagai aset dan dicatat sebagai nilai nominalnya, disajikan dalam laporan keuangan pos aset lancar dan diungkap hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian uang muka.

### 2.1.5. Perlakuan dan Penyajian Aset Lancar berdasarkan SAK ETAP dan PSAK

SAK ETAP tidak mengatur secara khusus aset lancar dalam bab khusus, karena perlakuan dan penyajian aset lancar berdasarkan SAK ETAP masih mengacu pada PSAK no. 09 tentang Aktiva lancar. Perbedaan yang paling mendasar mengenai perlakuan, penyajian dan pengungkapan aset lancar antara PSAK umum dan SAK ETAP yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Perlakuan Aset Lancar berdasarkan SAK ETAP dan PSAK**

No	Keterangan	PSAK	SAK ETAP
1.	Kas	Diatur dalam PSAK 09	Sama dengan PSAK perbedaannya terletak pada arus kas yang dianjurkan menggunakan metode tidak langsung
2.	Bank	Diatur dalam PSAK 09	Sama dengan PSAK
3.	Piutang	Diatur dalam PSAK 09	Sama dengan PSAK
4.	Persediaan	Diatur dalam PSAK 14	Sama dengan PSAK, diatur kembali dalam bab 11 tentang persediaan, dianjurkan menggunakan FIFO Method
5.	Biaya dibayar dimuka	Diatur dalam PSAK 09	Sama dengan PSAK
6.	Pendapatan yang masih harus diterima	Diatur dalam PSAK 09	Sama dengan PSAK
7.	Aset lancar lain	Diatur dalam PSAK 09	Sama dengan PSAK
8.	Penurunan nilai Aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan aset persediaan</li> <li>- Penurunan aset no persediaan</li> <li>- Penurunan goodwill</li> </ul>	Diatur dalam PSAK bab 22, penurunan nilai aset meliputi semua aset tetapi tidak mengatur goodwill. Mengatur tentang penurunan nilai pinjaman yang diberikan atau piutang.

Sumber : [www.keuangan.lsm.com](http://www.keuangan.lsm.com)

SAK ETAP (2016:29) menjelaskan bahwa dalam pemilihan dan penerapan kebijakan, kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Jika SAK ETAP mengatur secara spesifik mengatur transaksi, kejadian, atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP. Namun, entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam SAK ETAP jika dampaknya tidak material. Apabila SAK ETAP tidak mengatur secara spesifik suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya maka manajemen harus menggunakan pertimbangannya (*judgment*) untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan lain.

Dalam mempertimbangkan kebijakan tersebut, manajemen harus mengacu dan mempertimbangkan penerapan sumber-sumber berikut : 1) persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan isu yang serupa atau yang terkait; dan 2) definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan dan beban dan prinsip-prinsip pervasif. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, manajemen juga mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait. Jika tambahan pertimbangan perlu ditambahkan untuk membuat keputusan maka manajemen dapat mempertimbangkan peraturan terkini.

Aset lancar tidak dijelaskan secara khusus dalam SAK ETAP. Pengakuan, Pengukuran, penyajian dan pengungkapan Aset Lancar secara umum diatur dalam PSAK 09 tentang aset lancar. Dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Aset Lancar mengacu pada : (1) Standar Akuntansi Keuangan

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), (2) Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum), dan (3) Peraturan perundang-perundangan yang relevan dengan piutang koperasi.

Sesuai PSAK 09, aset lancar disajikan dalam neraca. Aset disajikan lancar atau tidaknya tergantung dari masa ekonomis aset tersebut. SAK ETAP menyatakan bahwa entitas harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka panjang dan jangka pendek sebagai suatu klasifikasi terpisah dalam neraca. Mengacu pada SAK ETAP pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.UMKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Sektor riil, penyajian aset lancar dalam laporan keuangan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Penyajian Aset Lancar dalam Neraca**

**Koperasi xxx**  
**NERACA**  
**Posisi : 31 Desember 20X1 dan 20X0**

<b>1. ASET</b>	<b>20X1 (Rp)</b>	<b>20X0 (Rp)</b>
<b>1.1.ASET LANCAR</b>		
1.1.1. Kas	xxx	xxx
1.1.2. Bank	xxx	xxx
1.1.3. Surat Berharga	xxx	xxx
1.1.4. Piutang Usaha	xxx	xxx
1.1.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxx)	(xxx)
1.1.6. Perlengkapan kantor	xxx	xxx
1.1.7. Persediaan Barang Dagang	xxx	xxx
1.1.8. Biaya dibayar dimuka	xxx	xxx
1.1.9. Pendapatan yang masih harus diterima	xxx	xxx
1.1.10. Aset Lancar Lainnya	xxx	xxx

Sumber : Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015

Berikut ini adalah jumlah atau besaran nominal aset lancar yang disajikan dalam neraca yaitu :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Nominal Pos dalam Aset Lancar Yang Disajikan**

<b>Pos Aset</b>	<b>Jumlah Tersaji</b>	<b>Peraturan</b>
Kas	Sejumlah nilai nominal dalam aset lancar, jika ada mata uang asing harus disajikan dengan mengonversi terlebih dahulu	SAK ETAP dan PSAK
Bank	Sejumlah nilai nominal dalam aset lancar	SAK ETAP dan PSAK
Surat Berharga	Sejumlah nilai perolehannya dalam aset lancar	SAK ETAP dan PSAK
Piutang Usaha	Disajikan sebesar nilai piutang kotor dikurangi nilai penyisihan piutang tak tertagih. Atau disajikan nilai bersih setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	SAK ETAP dan PSAK
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Disajikan sejumlah nilai estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih ditentukan dengan memperhatikan pengalaman, prospek industri, prospek usaha, kondisi keuangan dll sebagai akun kontra dari piutang yang mengurangi jumlah piutang	SAK ETAP Penurunan nilai aset
Persediaan Barang Dagang	Disajikan sesuai harga perolehan dalam aset lancar	SAK ETAP dan PSAK
Biaya dibayar dimuka	Disajikan sesuai harga perolehan dalam aset lancar	SAK ETAP dan PSAK
Pendapatan yang masih harus diterima	Disajikan sebesar nilai nominal dalam aset lancar	SAK ETAP dan PSAK
Aset Lancar Lainnya	Disajikan sebesar nilai nominalnya dalam aset lancar	SAK ETAP dan PSAK

Sumber : Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015



### 2.1.6. Analisis Ratio Keuangan

Mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan adalah merupakan dasar untuk dapat mengintrepretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan (Munawir 2014:64). Ratio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lainnya dan dengan menggunakan analisa dengan ratio ini akan dapat menggambarkan kepada penganalisis tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan.

Tujuan penganalisa pada umumnya adalah untuk mngetahui tingkat rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu angka-angka ratio pada umumnya digolongkan menjadi; (1) ratio-ratio likuiditas, (2) ratio-ratio solvabilitas, (3) ratio-ratio rentabilitas dan ratio-ratio

Ratio likuiditas, misalnya current ratio, acid test ratio, account receivable turnover, inventory turnover dan lain sebagainya. Ratio likuiditas adalah ratio yang digunakan untuk menganalisa dan mengintrepretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga sangat membantu untuk mngecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan (Munawir 2014:71). Ratio yang paling umum digunakan dalam mengukur likuiditas adalah current ratio, yaitu perbandingan antar hutang lancar dan aktiva lancar (Munawir 2014:72). Current ratio yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainnya dibandingkan dengan kebutuhan sekarang atau tingkat likuiditasnya rendah daripada aset lancar dan sebaliknya (Munawir 2014:72). Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat likuiditas tinggi yaitu salah satunya *present value* (nilai sesungguhnya) dari

aktiva lancar, sebab ada kemungkinan perusahaan mempunyai saldo piutang yang cukup besar tetapi hutang piutang tersebut sudah lama terjadi dan sulit ditagihkan sehingga nilai realisasinya kemungkinan lebih kecil (Munawir 2014:73). Selain itu tingkat likuiditas juga bisa dinilai dari perputaran piutang atau *account receivables turnover*. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang dengan membagi total penjualan kredit dengan piutang rata-rata (Munawir 2014:75). Makin tinggi ratio menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah sebaliknya kalau ratio semakin rendah berarti ada *over investment* dalam piutang sehingga memerlukan analisa lebih lanjut karena bagian kredit dan penagihan bekerja tidak efektif atau mungkin ada perubahan kebijaksanaan pemberian kredit (Munawir 2014:75)

Ratio solvabilitas, misalnya ratio antar modal sendiri dan total hutang, ratio antar modal sendiri dengan hutang jangka panjang, ratio antar modal sendiri dan aktiva tetap dan sebagainya. untuk menganalisis posisi keuangan jangka panjang dan hasil operasinya digunakan ratio solvabilitas (Munawir 2014:81). Ratio modal sendiri dengan total aktiva menunjukkan pentingnya dari sumber modal pinjaman atau tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor. Semakin tinggi ratio ini berarti semakin kecil jumlah pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan dan sebaliknya (Munawir 2014:82).

Ratio rentabilitas, misalnya *gross profit margin*, *operating income ratio*, *operating ratio*, *net profit margin*, ROA, ROI dan lain sebagainya. Ratio rentabilitas biasa digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan untuk operasi tersebut atau mengukur kemampuan perusahaan untuk

memperoleh keuntungan. Ratio yang berkaitan dengan rentabilitas aset yaitu *Return of Assets (ROA)* yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dilihat dari aset yang dikelola atau biasanya disebut pula *Ratio Operating Income* dengan *Operating Asset* hampir sama. Yang dimaksud operating aset adalah semua aktiva kecuali investasi jangka panjang dan aktiva-aktiva lainnya yang digunakan dalam kegiatan untuk memperoleh penghasilan (Munawir 2014:86).

## 2.2. Kerangka Teoritis

Menurut Teori Kepatuhan oleh Milgram (1974) dalam Atkinson dkk (2010:631) untuk memahami kepatuhan dalam sistem tertentu kita perlu memahami faktor-faktor yang memengaruhi orang untuk melepaskan otonominya dan secara sukarela menjadi bagian dari sistem, faktor-faktor tersebut antara lain norma sosial, pengawas, buffer dan pembenaran ideologi. KUD Kramat menggunakan SAK ETAP atas rekomendasi dari auditor eksternal KUD Kramat. Sebagai bukti kepatuhannya KUD Kramat menerapkan SAK ETAP untuk laporan keuangannya. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini akan meneliti tentang penerapan akuntansi piutang berdasarkan SAK ETAP dimana piutang merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian dari *Management Letter* hasil audit dari auditor eksternal sebagai sebuah akun yang belum sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada.

Permen KUKM nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (2015:16) menjelaskan bahwa penyajian merupakan proses penempatan pos/akun dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar. SAK ETAP (2016:11) menjelaskan bahwa penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain

yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan. Dalam penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP indikator penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP meliputi penyajian wajar, kepatuhan terhadap SAK ETAP, kelangsungan Usaha, frekuensi pelaporan, penyajian yang konsisten, informasi komparatif, materialitas dan agregasi, laporan keuangan lengkap dan identifikasi laporan keuangan (2016:11:13).

Permen KUKM nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (2015:16) menjelaskan bahwa perlakuan adalah proses pembentukan suatu pos dalam laporan keuangan serta mengukur dan menetapkan besaran jumlah uang yang digunakan untuk mengukur suatu akun. Perlakuan terdiri dari dua proses yaitu pengakuan unsur-unsur laporan keuangan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. SAK ETAP (2016:7) menjelaskan bahwa kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan kebijakan akuntansi yang digunakan. Dalam SAK ETAP tentang prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas mengungkapkan bahwa persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan keuangan.

Perlakuan akuntansi aset lancar menggunakan indikator yang ditetapkan oleh penulis melalui indikator perlakuan akun aset lancar yang dijelaskan dalam SAK ETAP yaitu kas, bank, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, Aset lancar lainnya dan ditambah dengan penurunan pinjaman yang diberikan atau piutang. melalui indikator perlakuan akun

tersebut maka dapat ditarik kesimpulan perlakuan akuntansi aset lancar pada KUD Kramat yang dapat memengaruhi penyajian laporan keuangan berdasarkan pada SAK ETAP.

Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP:

**Tabel 2.4.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yulinartati, 2013	Penerapan SAK ETAP pada Entitas Koperasi (Studi Kasus pada KUD Tri Karsa Jaya Kec. Bengalsasri Kab. Jember)	Penyajian laporan keuangan masih belum sesuai dengan SAK ETAP karena belum dibuatnya laporan arus kas, belum sesuainya konsep aset dan kewajiban serta konsep pendapatan dan beban.
2.	Abdul Rohaman dan Mas'amah, 2015	Evaluasi penenrapan Standar Akuntansi ETAP pada Organisasi Sekolah dasar Studi Kasus Sekolah Dasar Ulil Albab Palembang	Hampir secara keseluruhan belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP karena belum adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam sistem penengendalian, pencatatan masih menggunakan buku rekap belum buku jurnal, masih belum diterapkannya basis akrual, aplikasi yang belum terintegregasi, dan rekapitulasi masih menggunakan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran saja tanpa membuat laporan keuangan.
3.	Ade Astallia Pratiwi, Jullie J. Sondakh, dan Linjte kalangi, 2014	Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT Nichindo Manado Suisan	PT Nichindo Manado Suisan belum menyusun laporan keuangan secara lengkap menurut SAK ETAP, terjadinya inkonsistensi pada beberapa pos dalam penyajian Negara



			2011 dan 2012, dan belum menyatakan pernyataan secara eksplisit kepatuhannya terhadap SAK ETAP pada catatan atas laporan keuangannya.
4.	Muhammad Khafid dkk, 2010	Analisis PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan Usaha pada KPRI	Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan volume usaha secara signifikan. Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan kekayaan bersih. Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sisa hasil usaha secara signifikan.
5.	Sartika, 2014	Anlisis Akuntansi Piutang Usaha berdasarkan SAK ETAP pada CV Perintis Grafika Jaya Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	Masih diterapkannya metode penyisihan piutang langsung tanpa adanya penyisihan piutang, tidak adanya pemisahan antar piutang dagang dengan piutang karyawan, serta belum menerapkan pengakuan dan pencatatan piutang dagang sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

### 2.3. Kerangka Berpikir

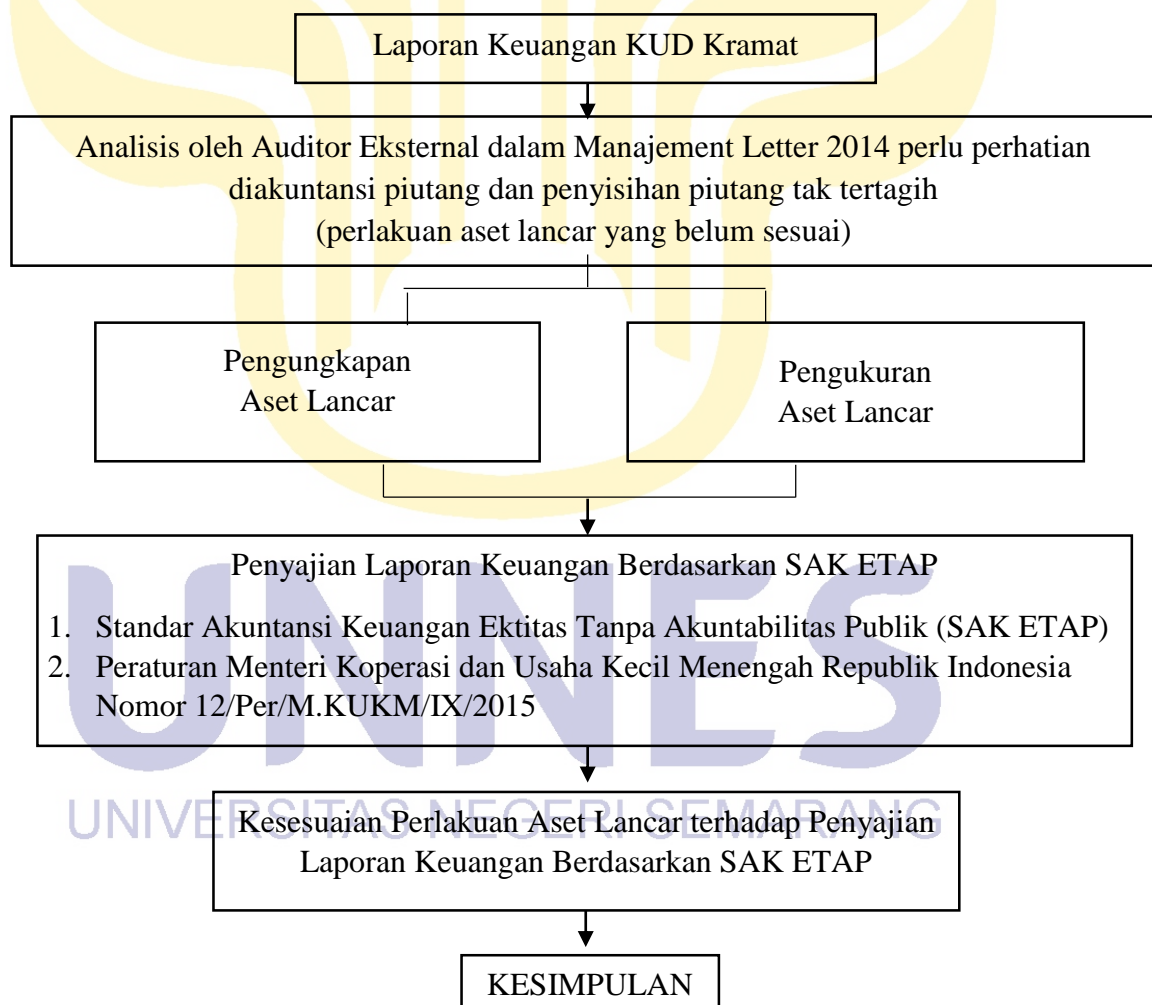
Teori Kepatuhan kepada penguasa (*Obedience Toward Auhority*) oleh Milgram (1974) dalam Atkinson (2010) menyatakan untuk memahami kepatuhan dalam sistem tertentu kita perlu memahami faktor-faktor yang memengaruhi orang untuk melepaskan otonominya dan secara sukarela menjadi bagian dari sistem.

Kepatuhan KUD Kramat dalam menetapkan suatu standar akuntansi laporan keuangan disebabkan karena saran dari auditor eksternal sebagai pengawas dan seseorang yang diakui kebenarannya sesuai dengan norma sosial atau peraturan yang berlaku. Sesuai dengan *Manajemen Letter* tahun 2014 bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan KUD Kramat adalah pada piutang macet dan penyisihan piutang tak tertagih yang merupakan bagian dari pos aset lancar di neraca.

SAK ETAP (2016:11) menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dinyatakan wajar apabila mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan akun. Penyajian laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan SAK ETAP apabila koperasi mengungkapkan dan mengukur suatu unsur laporan keuangan secara benar. Dalam melakukan penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Proses pengakuan dan pengukuran bisa disebut dengan perlakuan. Menurut SAK ETAP kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan kebijakan akuntansi yang digunakan (SAK ETAP 2016:7). Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan akan memengaruhi bagaimana suatu penyajian laporan akan sesuai atau tidak.

Permasalahan utama pada KUD Kramat berdasarkan *Manajemen Letter* dari auditor eksternal KUD Kramat yaitu pada piutang dan penyisihan piutang tak tertagih dimana keduanya merupakan akun yang disajikan dalam aset lancar. Sehingga penelitian akan difokuskan pada aset lancar saja. Penelitian akan

difokuskan pada perlakuan aset lancar sesuai dengan permasalahan yang ada, dimana perlakuan aset lancar KUD Kramat yang masih perlu perhatian akan memengaruhi penyajian laporan keuangan KUD Kramat berdasarkan SAK ETAP yang akan dikomparasikan kesesuaiannya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi sektor riil. Sehingga dapat disimpulkan kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada KUD Kramat. Kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian  
Sumber : Hasil Pengolahan Data Peneltian

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang analisis perlakuan aset lancar terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP studi kasus di KUD Kramat Kabupaten Tegal. Dapat diambil kesimpulan sesuai pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Ada ketidaksesuaian perlakuan aset lancar dalam laporan keuangan KUD Kramat tahun buku 2014, 2015 dan 2016 berdasarkan SAK ETAP yaitu masih diakuinya piutang yang sulit ditagihkan sebagai aset karena adanya piutang program zaman orde baru yang penghapusannya harus melalui prosedur kepada pemerintah, tidak diakuinya biaya dibayar dimuka atas PPh pasal 25 karena kesalahan bagian pembukuan, dan penurunan nilai aset yang tidak menerapkan metode penyisihan piutang mulai tahun 2014 karena digantikan dengan sistem penjualan tunai.
- 2) Ada ketidaksesuaian perlakuan aset lancar yang memengaruhi ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yaitu tidak sesuainya perlakuan piutang usaha dan penurunan nilai aset menunjukkan aset lancar tidak disajikan secara wajar sehingga memengaruhi ratio likuiditas menjadi tinggi karena banyaknya aset lancar yang tidak produktif, perputaran piutang rendah karena banyaknya piutang yang tidak tertagih dan ratio solvabilitas menjadi rendah karena banyaknya modal pinjaman yang ditanamkan pada aset lancar, serta tidak sesuainya perlakuan PPh Pasal 25 menunjukkan aset lancar tidak

disajikan secara wajar sehingga memengaruhi ratio rentabilitas menjadi tinggi karena SHU tidak disajikan sesuai dengan nilai bersih setelah pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan KUD kurang baik. Selain itu tidak disusunnya laporan arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tahun 2016 dan tidak disajikannya secara komparatif laporan perhitungan usaha tahun 2016 menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak memenuhi syarat penyajian laporan keuangan yang konsisten, komparatif dan kelengkapan laporan keuangan sehingga memengaruhi penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

## 5.2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai berikut :

### 1) Bagi KUD Kramat

- a) Sebaiknya pengurus KUD perlu menyusun ulang format laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAK ETAP yang berasal dari sumber-sumber peraturan yang terpercaya baik berasal dari auditor, pemerintah ataupun sumber lainnya untuk menjadi acuan penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya yang lebih baik.
- b) Peningkatan pengetahuan bagian pembukuan mengenai SAK ETAP untuk koperasi yang berasal dari peraturan pemerintah sehingga penyajian laporan keuangan akan sesuai dengan peraturan yang terbaru.
- c) Sebaiknya pengurus KUD Kramat menentukan kebijakan atas penyisihan piutang tertagih yang terbaru agar setiap tahunnya piutang



macet yang tertera dapat sedikit berkurang. Apabila hal tersebut harus melibatkan pemerintah sebaiknya pencarian informasi lebih mendalam harus dilakukan agar solusi dari piutang macet/program dapat terselesaikan.

2) Bagi Pemerintah

- a) Peningkatan pengawasan kepada KUD harus lebih ditingkatkan kembali untuk peningkatan kinerja KUD serta peningkatan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Tegal pula sehingga mampu melihat secara nyata kondisi koperasi dilapangan.
- b) Peningkatan sosialisasi peraturan terbaru kepada seluruh koperasi di Kabupaten Tegal melalui pelatihan mengenai format laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP sehingga terjadi keseragaman format laporan keuangan koperasi seluruh Kabupaten Tegal.
- c) Menjadi perantara bagi KUD berkaitan dengan permasalahan piutang macet atau piutang program dan prosedur penghapusannya agar laporan keuangan KUD semakin bersih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, Rita L., Daryl J. Bem., & Richard C. Atkinson et al., (2010). *Pengantar Psikologi Jilid Dua*. Tangerang: Karisma Publishing Grup.
- Boeree, C George. (2006). *Dasar-Dasar Psikologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Haryani, Endang. April (2012). Accounting System for Small Business in Indonesia (Case Study Convection Business in Tingkir Lor Village). *Research World Journal of Art, Science and Commerce*. Vol. 3 No. 2. Hal 104-111.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Pengertian Atandar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap>. (diunduh 13 Juli 2017)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jasra, Javed Mahmood et al., November (2011). Determination of Business Succes of Small and Medium Enterprises. *International Journal of Business and Social Science* Vol.2. No. 20. Hal. 274-280.
- Keuangan LSM. (2017). *Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK*. <http://keuanganlsm.com/perbedaan-sak-etap-dengan-psak/> . (diunduh pada 20 April 2017)
- Khafid, Mohammad dkk. Maret. (2010). Analisis PSAK NO. 27 Tentang Akuntansi Perkoprasian dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Usaha KPRI. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol.2. No. 1. Hal 37-45.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir-KUKM. (2014). *Kriteria Persyaratan Clon Penerima Pinjaman Koperasi Sektor Riil*. <http://lpdb.id/layanan/skim-pinjaman/pembiayaan-kepada-koperasi-sektor-riil.html>. (diunduh pada 11 Juli 2017)
- Leries, Floren Violetfin. April (2013). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Kasus pada CV Citra Pandion Bernas di kabupaten Solok). *Economics Jurnal Program Studi ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat* Vol.1. No. 2. Hal. 95-103.
- Martani, Dwi et al., (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.

- Munawir. (2014). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 09 Tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Lancar.
- Pratiwi, Ade Astalia et al., September (2014). Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal EMBA* Vol. 2. No. 3. Hal 254-265.
- Pratiwi, Nurita Budi dan Rustam Hanafi. Januari (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi Indonesia* Vol 5. No. 1. Hal 79-98.
- Reeve, M. James dkk. (2012). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmah, Abdul & Mas'amah. (2015). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi ETAP pada Organisasi Sekolah Dasar Studi Kasus Sekolah Dasar Ulil Albab Palembang. *SNEMA* Vol 5. No. 5 Hal. 578-589.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sartika. (2014). Analisis Akuntansi Piutang usaha berdasarkan SAK ETAP pada CV Perintis Grafika Jaya Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Sengingi. *Skripsi*. Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sarwo, Sarlito W., & Eko A. Meinarno. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Fajar Interpratama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarsono, Sonny. (2003). *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Thomas, Partono. (2011). *Dasar Manajemen Keuangan*. Semarang: Unnes Press

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 200 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wahyudin, Agus dan Muhammad Khafid. (2013). *Akuntansi Dasar*. Semarang: Unnes Press.

Wahyuni, Ersa Tri dan Ng Eng Juan. (2014). *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Wulanditya, Putri.(2012). The SME Perception Towards The Accounting Standart Without Accountability (SAK-ETAP) and Self Assessment System for Increasing Voluntary Tax cimpliance. *Research World Journal of Art, Science and Commerce*. Vol. 3. No. 3 Hal. 231-243.

Yuliana, Rena Apri. (2013). Analisis Metode Cadangan Terhadap Piutang Tak tertagih Sesuai SAK ETAP (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI "SEHAT". *Jurnal Riset Mahasiswa Universitas Kanjuran Malang*. Vol. 13. No. 4. Hal. 1-10

Yulinartati. (2013). Penerapan SAK ETAP pada Entitas Koperasi Studi Kasus Pada KUD Tri Karsa Jaya Kec. Bengalsari Kab. Jember. *JEAM* Vol XII. No. 1. Hal 87-103.